

Pendampingan Pengembangan Manajemen Edupreneurship Berbasis Kolaborasi
di Phatnaewitya School Yala-Thailand

Suripto^{*1}, Ilyas Agung Nasrulloh²

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung, Jl. Pahlawan Gg.III/No.27Ds.Ketanon Kec.Kedungwaru,
(0355) 322376,

e-mail: suripto@staimta.ac.id, agungnasrulloh22@gmail.com

Diterima:15 Oktober 2025 | Dipublikasikan:2 November 2025

ABSTRACT

The purpose of this community service is to develop collaborative edupreneurship management at Patnaewitya School Yala-Thailand as an effort to increase school independence and empower the minority Muslim community. Departing from the background of problems in the form of limited funds, weak entrepreneurial management, and lack of external support experienced by schools, innovative strategies are needed to maintain the sustainability of education. The research method uses a qualitative approach with *the Participatory Action Research (PAR)* model, which involves teachers, students, parents, and the community in every stage of diagnosis, planning, implementation, and evaluation. The results of the study showed significant positive changes, including increasing school financial independence through simple business units, increasing students' practical skills in production, management, and marketing, and strengthening social networks between schools and communities. The main supporting factors include collective spirit, Islamic values, and community solidarity, while obstacles encountered are limited capital, resistance of some parents and students, and time management problems. The conclusion of this study confirms that collaboration-based edupreneurship is not only a solution to financial limitations, but also a transformative instrument that is able to integrate education, cultural identity strengthening, and socio-economic development in Muslim minority communities.

Keywords: *Edupreneurship, Collaboration, Participatory Action Research, Muslim Minority Schools, Southern Thailand.*

Pendahuluan

Pendidikan dewasa ini tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Tren global menunjukkan bahwa pendidikan semakin diarahkan untuk melahirkan generasi yang tidak sekadar memiliki kecakapan akademik, tetapi juga kompetensi kewirausahaan. Dalam konteks ini, konsep edupreneurship menjadi sangat relevan karena memadukan misi pendidikan dengan penguatan ekonomi melalui aktivitas kreatif dan inovatif (Kuratko, 2016).

Di kawasan Asia Tenggara, khususnya Thailand Selatan, tantangan dunia pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri. Sekolah-sekolah yang beroperasi di wilayah minoritas Muslim menghadapi berbagai keterbatasan seperti dukungan dana yang minim, fasilitas yang terbatas, dan kondisi sosial politik yang seringkali penuh tekanan (Harish, 2020). Hal ini menyebabkan banyak lembaga pendidikan harus mencari strategi alternatif agar tetap mampu bertahan sekaligus berkembang.

Patnaewitya School Yala merupakan salah satu sekolah minoritas Muslim yang menghadapi realitas tersebut. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah komunitas Muslim minoritas, sekolah ini dituntut tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, tetapi juga memastikan kemandirian finansial. Kondisi tersebut mendorong lahirnya inisiatif untuk mengintegrasikan praktik edupreneurship ke dalam manajemen sekolah sebagai strategi penguatan ekonomi sekaligus pemberdayaan komunitas.

Konsep edupreneurship sendiri telah banyak dikaji dalam literatur pendidikan. Menurut Gibb (2002), edupreneurship merupakan integrasi antara pendidikan dengan kewirausahaan yang menekankan inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat produksi ide, keterampilan, dan peluang ekonomi. Edupreneurship pada dasarnya membuka jalan bagi sekolah untuk membangun kemandirian finansial tanpa kehilangan fungsi utama sebagai institusi pendidikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi edupreneurship dapat meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan. Studi di beberapa pesantren dan madrasah di Indonesia misalnya menegaskan bahwa kegiatan kewirausahaan yang terintegrasi dengan pendidikan mampu menciptakan kemandirian ekonomi, memperkuat kultur kerja sama, dan mendukung keberlanjutan program pendidikan (Azra, 2019; Hidayat, 2021). Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi inspirasi bagi sekolah minoritas Muslim di luar Indonesia untuk menerapkan strategi serupa.

Selain kajian mengenai edupreneurship, studi tentang kolaborasi dalam pendidikan juga memberikan landasan penting. Ansell dan Gash (2008) melalui teori Collaborative Governance menekankan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan suatu program, khususnya ketika terdapat keterbatasan sumber daya. Prinsip dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama yang mereka tawarkan relevan untuk membangun manajemen edupreneurship di sekolah yang memiliki keterikatan erat dengan komunitas.

Penelitian lain tentang program pendampingan berbasis *Participatory Action Research* (PAR) juga memperkuat relevansi pendekatan ini. Beberapa pengabdian masyarakat di madrasah di Indonesia dan sekolah di Malaysia menunjukkan bahwa metode pendampingan partisipatif memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan komunitas, serta mempercepat penguatan manajerial lembaga pendidikan (Burns, 2015; McIntyre, 2008). Temuan ini mendukung urgensi penggunaan PAR sebagai pendekatan dalam pengembangan manajemen edupreneurship.

Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks Indonesia atau negara mayoritas Muslim. Kajian yang mendalam mengenai pengembangan edupreneurship pada sekolah minoritas Muslim di Thailand Selatan masih sangat terbatas. Terlebih lagi, hampir tidak ada penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana model kolaborasi multi-stakeholder dapat diintegrasikan dengan praktik edupreneurship dalam konteks tersebut (Rahman, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendampingan dapat mengembangkan manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi di Patnaewitya School Yala Thailand. Pertanyaan ini penting dijawab untuk menemukan model yang tepat sekaligus dapat direplikasi pada sekolah minoritas lain dengan karakteristik serupa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pendampingan yang dilakukan, menganalisis dinamika kolaborasi yang terbentuk, serta merumuskan model pengembangan manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi di sekolah minoritas Muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada praktik jangka pendek, tetapi juga kontribusi strategis jangka panjang.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Teori ini menjelaskan pentingnya membangun dialog, trust, dan komitmen bersama antara berbagai pemangku kepentingan. Teori ini didukung oleh konsep edupreneurship dari Kuratko (2016) dan Gibb (2002) yang menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pendidikan. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research digunakan sebagai kerangka metodologis untuk memastikan partisipasi aktif komunitas dalam proses pendampingan (McIntyre, 2008).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi yang diterapkan pada sekolah minoritas Muslim di Thailand Selatan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek kewirausahaan di lembaga pendidikan mayoritas Muslim, sementara penelitian ini memberikan kontribusi baru pada konteks minoritas yang memiliki tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang unik.

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoretis sekaligus praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian edupreneurship dengan perspektif collaborative governance yang sebelumnya jarang digunakan. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran model yang dapat direplikasi oleh sekolah minoritas Muslim di Asia Tenggara sebagai strategi mencapai kemandirian finansial dan keberlanjutan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni melakukan pendampingan sekaligus mengembangkan model manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi di Patnaewitya School Yala, Thailand. Karakteristik PAR yang menekankan keterlibatan aktif partisipan, siklus tindakan, dan refleksi bersama sangat relevan untuk mengkaji sekaligus memperkuat kapasitas manajerial sekolah dalam menghadapi tantangan kemandirian finansial. Melalui PAR, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, melainkan juga sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan subjek penelitian merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang dijalankan (McIntyre, 2008; Burns, 2015).

Penelitian dilaksanakan di Patnaewitya School, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Yala, Thailand Selatan. Sekolah ini dipilih secara purposif karena merupakan representasi sekolah minoritas Muslim yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan membutuhkan inovasi manajemen pendidikan. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, serta perwakilan komunitas sekitar yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan implementasi program edupreneurship. Partisipan dipilih karena memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan praktik kewirausahaan sekolah, sehingga dapat memberikan perspektif menyeluruh terhadap proses kolaborasi.

Proses penelitian dilaksanakan melalui tahapan siklus PAR yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap identifikasi masalah, peneliti bersama warga sekolah melakukan diagnosis kebutuhan terkait kelemahan manajemen unit usaha serta potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan. Tahap selanjutnya adalah perencanaan tindakan, di mana strategi pengembangan edupreneurship dirancang melalui diskusi partisipatif yang melibatkan guru, siswa, dan komunitas. Implementasi tindakan dilakukan dalam bentuk pendampingan langsung pada kegiatan kewirausahaan sekolah, mulai dari penyusunan rencana bisnis sederhana, pembagian peran, hingga pelaksanaan unit usaha yang dirancang.

Selama implementasi, peneliti melakukan observasi partisipatif untuk mencatat dinamika interaksi antarpartisipan, hambatan yang muncul, serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Data tambahan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan tokoh masyarakat guna menggali pengalaman mereka dalam berkolaborasi. Selain itu, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) juga dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan program. Semua proses tersebut didukung oleh dokumentasi berupa arsip sekolah, catatan rapat, serta foto dan video kegiatan yang menjadi bukti pelaksanaan pendampingan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel tematik agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan melibatkan proses refleksi bersama partisipan, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya valid secara akademis tetapi juga dapat diterima secara praktis oleh warga sekolah. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber serta waktu yang berbeda.

Aspek etika menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Setiap partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, proses yang akan dijalani, serta manfaat yang dapat diperoleh. Persetujuan sukarela atau *informed consent* dikumpulkan sebelum partisipasi mereka dimulai. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya, dan semua data hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan memastikan bahwa

partisipan bukan sekadar objek penelitian, tetapi juga subjek aktif yang ikut menentukan arah dan hasil dari proses pendampingan.

Dengan desain dan prosedur tersebut, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai pengembangan manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi di sekolah minoritas Muslim, serta memberikan kontribusi praktis bagi keberlanjutan pendidikan di Patnaewitya School Yala Thailand.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Patnaewitya School Yala

a. Profil singkat sekolah: konteks sosial, budaya, dan ekonomi

Patnaewitya School Yala merupakan salah satu sekolah swasta Islam yang terletak di wilayah Yala, Thailand Selatan. Secara sosial, sekolah ini berada di tengah komunitas mayoritas Muslim yang berupaya mempertahankan identitas budaya dan keagamaan di tengah dominasi sistem pendidikan nasional Thailand yang berorientasi Buddhis. Lingkungan sosial di sekitar sekolah masih kental dengan tradisi gotong royong, solidaritas keagamaan, dan nilai kekeluargaan. Salah satu guru senior menuturkan bahwa *“sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga simbol keberadaan umat Islam di Yala”* (Wawancara, 14 Juni 2025).

Dari sisi budaya, Patnaewitya School memadukan dua identitas: budaya Melayu-Muslim lokal dan kultur akademik Thailand. Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa Melayu Pattani sebagai bahasa sehari-hari, sementara bahasa Thailand digunakan dalam interaksi formal. Upaya mempertahankan tradisi Islam juga tampak dalam kurikulum tambahan yang mengajarkan tahfidz, fiqh, dan bahasa Arab. Seorang siswa kelas menengah menyatakan *“kami belajar bahasa Thailand di kelas, tetapi di rumah dan dengan teman-teman lebih sering pakai bahasa Melayu”* (Wawancara, 15 Juni 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya bilingualisme yang khas, yang berimplikasi pada cara siswa memandang identitas mereka sebagai warga Muslim sekaligus warga negara Thailand.

Secara ekonomi, sebagian besar keluarga siswa berasal dari kelas menengah ke bawah dengan mata pencaharian utama sebagai petani karet, nelayan, dan pedagang kecil. Ketergantungan pada sektor informal membuat daya dukung ekonomi keluarga terhadap biaya pendidikan terbatas. Kepala sekolah menuturkan, *“sebagian besar orang tua tidak bisa membayar biaya sekolah secara penuh, maka sekolah harus mencari cara lain untuk bertahan”* (Wawancara, 20 Juni 2025). Kondisi ini berpengaruh pada keuangan sekolah yang cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Oleh karena itu, sekolah mulai mengembangkan unit-unit usaha kecil seperti kantin, kerajinan lokal, dan koperasi siswa untuk menambah sumber pendanaan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai latar belakang sosial-ekonomi orang tua siswa, berikut disajikan tabel distribusi pekerjaan utama keluarga siswa Patnaewitya School hasil observasi dan dokumentasi sekolah tahun 2025:

Pekerjaan Utama Orang Tua	Persentase (%)
Petani karet	42
Nelayan	25
Pedagang kecil	18
Pegawai swasta	10
Lain-lain (buruh harian, dll.)	5

Tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas orang tua bekerja di sektor primer (pertanian karet dan perikanan), yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Dengan demikian, keberadaan sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Dari paparan konteks sosial, budaya, dan ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa Patnaewitya School Yala menghadapi tantangan ganda: menjaga identitas budaya-keagamaan sekaligus mencari solusi keberlanjutan ekonomi. Realitas inilah yang melatarbelakangi urgensi penerapan manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi agar sekolah dapat bertahan dan

berkembang di tengah keterbatasan.

b. Tantangan yang dihadapi

Patnaewitya School Yala menghadapi realitas finansial yang cukup kompleks. Sebagai sekolah swasta Islam, sumber dana utama berasal dari iuran siswa dan bantuan terbatas dari yayasan pendidikan lokal. Namun, karena mayoritas orang tua berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kemampuan membayar biaya pendidikan secara rutin sering terhambat. Salah seorang bendahara sekolah mengungkapkan, *“ada sekitar 30 persen siswa yang menunggak pembayaran lebih dari satu semester, tapi kami tidak bisa menolak mereka karena pendidikan adalah hak semua anak”* (Wawancara, 23 Juni 2025).

Minimnya dukungan pemerintah juga menjadi masalah signifikan. Sekolah swasta Islam di Thailand Selatan sering kali tidak mendapat alokasi anggaran setara dengan sekolah negeri yang mayoritas berafiliasi dengan sistem pendidikan Buddhis. Hal ini membuat Patnaewitya School harus mengandalkan inisiatif internal untuk tetap bertahan. Kepala sekolah menuturkan, *“kalau menunggu bantuan pemerintah, sekolah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kami harus mencari jalan sendiri”* (Wawancara, 20 Juni 2025).

Selain keterbatasan dana operasional, sekolah juga menghadapi persoalan pemeliharaan sarana prasarana. Beberapa ruang kelas masih menggunakan fasilitas sederhana, dan peralatan praktik kewirausahaan terbatas. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar ruang laboratorium kosong karena kurangnya peralatan standar. Kondisi ini memengaruhi kualitas pembelajaran, khususnya dalam pelajaran berbasis praktik seperti sains dan keterampilan hidup.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan inovasi finansial menjadi semakin mendesak. Beberapa upaya sudah dilakukan, seperti membuka kantin sekolah, menjual produk kerajinan siswa, dan mengembangkan koperasi kecil. Akan tetapi, program-program tersebut masih berjalan sporadis tanpa manajemen yang terstruktur. Salah seorang guru pengampu program keterampilan mengeluhkan, *“kami sudah mencoba membuat kerajinan dan menjualnya, tapi manajemennya belum kuat sehingga keuntungan tidak konsisten”* (Wawancara, 18 Juni 2025).

Secara umum gambaran situasi keuangan dengan kebutuhan sekolah menunjukkan adanya defisit keuangan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kekurangan ini sering kali ditutupi dengan cara menggali sumber dana dari partisipasi masyarakat dan sektor usaha lainnya. Kondisi semacam ini tentu membutuhkan effort manajemen edupreneurship untuk menjaga stabilitas operasional sekolah.

Dengan demikian, tantangan utama Patnaewitya School bukan hanya persoalan dana yang terbatas, tetapi juga stabilitas keuangan sekolah. Inilah yang menjadikan inovasi dalam manajemen edupreneurship sebagai kebutuhan mendesak, karena tanpa langkah strategis dan kolaboratif, keberlanjutan sekolah akan semakin sulit dicapai.

c. Posisi sekolah sebagai minoritas Muslim di Thailand Selatan.

Patnaewitya School Yala memiliki kedudukan yang unik karena berada di tengah-tengah komunitas Muslim Melayu yang merupakan minoritas dalam struktur nasional Thailand. Secara demografis, penduduk Muslim di Yala, Pattani, dan Narathiwat memang menjadi mayoritas lokal, namun secara nasional mereka tetap menjadi kelompok minoritas dengan representasi politik, ekonomi, dan pendidikan yang terbatas. Posisi ini memengaruhi dinamika keberlangsungan sekolah, baik dalam hal pengakuan kurikulum, akses pendanaan, maupun hubungan dengan pemerintah.

Dalam wawancara, kepala sekolah menuturkan, *“kami sering harus menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah pusat yang kadang tidak memahami kebutuhan pendidikan Islam di wilayah selatan”* (Wawancara, 21 Juni 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya tensi kultural dan administratif antara identitas lokal dengan kebijakan nasional.

Secara budaya, sekolah menjadi simbol penting bagi komunitas Muslim dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman. Masyarakat melihat Patnaewitya School bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga benteng identitas. Seorang tokoh masyarakat menegaskan, *“anak-anak kami belajar di sini supaya tetap mengenal agama dan bahasa sendiri, meskipun mereka juga harus ikut kurikulum nasional”* (Wawancara, 22 Juni 2025). Dengan demikian,

sekolah berfungsi ganda: sebagai penyedia pendidikan formal sekaligus sebagai pusat pelestarian budaya dan agama.

Dalam konteks sosial-politik, posisi minoritas juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam memperoleh dukungan negara. Beberapa informan menyebutkan bahwa sekolah swasta Islam jarang mendapatkan akses hibah infrastruktur yang proporsional dibandingkan sekolah negeri. Namun, hal ini justru memacu munculnya solidaritas komunitas dalam mendukung sekolah secara mandiri. Solidaritas inilah yang menjadi salah satu fondasi bagi lahirnya gagasan edupreneurship sebagai strategi survival.

Dengan demikian, posisi Patnaewitya School sebagai minoritas Muslim di Thailand Selatan tidak hanya mencerminkan keterbatasan struktural, tetapi juga menegaskan pentingnya kemandirian dan inovasi. Identitas minoritas yang melekat pada sekolah justru dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan model pendidikan yang relevan dengan kebutuhan komunitas lokal sekaligus adaptif terhadap sistem nasional.

2. Identifikasi Masalah Manajemen Edupreneurship.

a. Kelemahan Awal dalam Manajemen Kewirausahaan Sekolah

Hasil observasi awal dan diskusi dengan warga sekolah menunjukkan bahwa unit-unit kewirausahaan yang dimiliki Patnaewitya School Yala belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat beberapa usaha kecil seperti kantin sekolah, koperasi siswa, dan produksi kerajinan lokal, namun aktivitas tersebut masih bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan belum memiliki sistem manajemen yang solid. Seorang guru pengampu kewirausahaan menyatakan, *“kami sudah mencoba mengembangkan usaha siswa, tapi tidak ada sistem pencatatan yang jelas, sehingga sering kali keuntungan tidak terkontrol”* (Wawancara, 28 Juni 2025).

Salah satu kelemahan mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manajerial. Guru lebih banyak berfokus pada tugas pengajaran formal sehingga pendampingan dalam pengelolaan unit usaha sering terabaikan. Sementara itu, siswa yang menjadi pelaksana utama kegiatan kewirausahaan masih membutuhkan pembimbingan intensif dalam hal perencanaan usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Seorang siswa kelas atas menyampaikan, *“kami bisa membuat produk, tapi bingung cara menjualnya dan menghitung keuntungan”* (Wawancara, 29 Juni 2025).

Kurangnya kolaborasi juga menjadi faktor signifikan. Hingga tahap awal penelitian ini, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung program kewirausahaan masih minim. Aktivitas usaha cenderung dikelola secara internal oleh sekolah tanpa adanya jejaring dengan pihak luar. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses pasar, modal, dan inovasi produk. Padahal, berdasarkan catatan dokumentasi sekolah, sekitar 65% orang tua siswa berprofesi sebagai pedagang atau memiliki usaha mikro, yang sebenarnya dapat menjadi mitra potensial dalam pengembangan edupreneurship.

Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai kelemahan awal dalam manajemen kewirausahaan sekolah, berikut disajikan tabel hasil temuan lapangan:

Aspek	Kelemahan yang Ditemukan	Dampak
Manajemen usaha	Tidak ada sistem pencatatan keuangan yang rapi	Keuntungan tidak terkontrol
Sumber daya manusia	Guru fokus pada pembelajaran formal, siswa minim keterampilan manajerial	Usaha tidak berkelanjutan
Kolaborasi	Minim dukungan orang tua & masyarakat	Pasar terbatas, modal rendah
Inovasi produk	Produk sederhana, kurang diferensiasi	Daya saing rendah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masalah utama bukan hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada lemahnya kapasitas manajerial dan jejaring kolaboratif. Situasi ini memperkuat urgensi pendampingan berbasis *Participatory Action Research (PAR)*, di mana kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui proses partisipatif yang melibatkan semua

pemangku kepentingan sekolah.

b. Hasil Diagnosis Awal Bersama Warga Sekolah (Fase Awal PAR)

Tahap awal penelitian ini dilakukan melalui proses diagnosis partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan perwakilan orang tua. Forum diskusi kelompok terarah (FGD) dilaksanakan untuk mengidentifikasi masalah mendasar dalam pengelolaan kewirausahaan sekolah. Proses ini menegaskan prinsip dasar *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu kolaborasi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam mengenali permasalahan sebelum menentukan strategi tindakan.

Dalam sesi FGD pertama, muncul berbagai persepsi tentang kondisi kewirausahaan sekolah. Kepala sekolah menuturkan, *“kami punya semangat untuk menjadikan sekolah lebih mandiri, tetapi kami belum tahu cara menyusun strategi usaha yang terencana”* (FGD, 2 Juni 2025). Guru-guru lebih menyoroti keterbatasan waktu dan keahlian. Salah seorang guru menyampaikan, *“kami ingin membantu, tetapi beban mengajar sangat padat sehingga sulit fokus pada usaha sekolah”* (FGD, 2 Juni 2025).

Sementara itu, siswa menekankan perlunya pembimbingan dalam praktik kewirausahaan. Seorang siswa kelas XI menyatakan, *“kami senang belajar usaha, tapi kadang tidak jelas apa yang harus dilakukan, apalagi soal pemasaran”* (FGD, 3 Juni 2025). Perspektif ini menunjukkan bahwa motivasi siswa cukup tinggi, namun masih belum diarahkan dalam sistem manajemen yang jelas.

Dari pihak orang tua, permasalahan yang diangkat lebih pada aspek keberlanjutan usaha. Seorang perwakilan komite sekolah menyebutkan, *“kalau usaha sekolah mau jalan, orang tua siap bantu. Tapi perlu ada sistem yang transparan supaya kami percaya”* (FGD, 3 Juni 2025). Pernyataan ini menegaskan pentingnya aspek akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi kolaborasi.

Hasil diagnosis partisipatif ini kemudian dirangkum dalam tiga temuan utama:

Dimensi	Temuan Utama dari Diagnosis Awal
Manajerial	Tidak ada perencanaan usaha yang terstruktur, minim pencatatan dan laporan
Partisipasi	Motivasi siswa tinggi, guru terbatas waktu, orang tua butuh transparansi
Sumber daya	Modal terbatas, produk usaha sederhana, akses pasar kecil

Temuan diagnosis awal ini memperlihatkan bahwa persoalan kewirausahaan sekolah bukan hanya soal keterbatasan dana, melainkan juga mencakup manajemen, partisipasi, dan sumber daya. Oleh karena itu, fase selanjutnya dalam siklus PAR diarahkan pada perencanaan tindakan kolaboratif untuk menguatkan aspek-aspek tersebut.

3. Implementasi Edupreneurship Berbasis Kolaborasi

a. Proses Perencanaan Program Edupreneurship

Perencanaan program edupreneurship di sekolah dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan. Hal ini sesuai prinsip *Participatory Action Research (PAR)* yang menekankan keterlibatan aktif subjek penelitian dalam merumuskan rencana tindakan. Pada tahap awal, dilakukan serangkaian musyawarah bersama yang difasilitasi peneliti sebagai mediator.

Rapat pertama difokuskan pada pemetaan potensi lokal dan minat siswa. Guru bidang studi ekonomi mengungkapkan, *“kami melihat banyak siswa yang sebenarnya memiliki keterampilan praktis, seperti membuat makanan ringan atau kerajinan, hanya saja mereka belum diberi ruang untuk mengembangkannya di sekolah”* (Wawancara, 10 Juni 2025). Hasil observasi mendukung pernyataan ini, terlihat dari kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan namun belum diarahkan menjadi kegiatan produktif bernilai ekonomi.

Siswa sendiri menunjukkan antusiasme tinggi dalam perencanaan. Salah seorang siswa kelas XII berkata, *“kalau bisa, program ini jangan hanya teori di kelas. Kami ingin langsung praktek, misalnya belajar jualan atau bikin produk”* (Diskusi Siswa, 12 Juni 2025). Pandangan ini

menegaskan bahwa perencanaan perlu diarahkan pada program yang aplikatif, bukan sekadar pengetahuan kognitif.

Masyarakat sekitar juga terlibat dalam proses perencanaan, terutama dari kalangan orang tua dan pelaku usaha lokal. Seorang tokoh masyarakat menuturkan, *“kami berharap sekolah bisa menjadi mitra. Kalau usaha anak-anak bagus, kami siap membantu pemasaran melalui koperasi desa atau jejaring komunitas”* (FGD, 14 Juni 2025). Dukungan ini memperkuat posisi sekolah sebagai pusat kolaborasi yang dapat menghubungkan pendidikan dengan dunia nyata.

Berdasarkan serangkaian diskusi tersebut, disepakati bahwa perencanaan program edupreneurship akan difokuskan pada tiga hal utama:

1. Pemetaan potensi dan minat siswa untuk menyesuaikan jenis usaha dengan keterampilan yang dimiliki.
2. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan manajemen usaha sederhana.
3. Pelibatan masyarakat dan orang tua sebagai mitra pendukung terutama dalam aspek modal, bahan baku, dan pemasaran.

Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen kerja sama internal sekolah dengan pihak komite, serta diproyeksikan dalam bentuk kalender kegiatan tahunan. Dengan demikian, perencanaan program tidak lagi bersifat sepihak, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang dapat dipertanggungjawabkan bersama.

b. Bentuk Kolaborasi

Kolaborasi dalam implementasi edupreneurship di Patnaewitya School berlangsung melalui pembagian peran yang jelas antara pihak sekolah, komunitas, dan stakeholder eksternal. Sekolah bertindak sebagai pusat inisiasi program, komunitas berfungsi sebagai pendukung sosial dan budaya, sementara stakeholder eksternal hadir memberikan legitimasi, akses sumber daya, dan jejaring ekonomi. Model kolaborasi ini mencerminkan prinsip *collaborative governance* sebagaimana dipaparkan oleh Ansell dan Gash (2008), di mana keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemauan bersama untuk bekerja dalam sistem kemitraan yang setara.

Dari sisi sekolah, guru berperan sebagai fasilitator dan mentor. Seorang guru menuturkan, *“kami bukan hanya mengajarkan teori manajemen usaha, tapi juga mendampingi siswa saat mereka mulai membuat produk dan menghitung modal”* (Wawancara, 20 Juni 2025). Siswa diberi ruang sebagai pelaku utama dalam praktik usaha. Hal ini sejalan dengan visi sekolah yang ingin menanamkan kemandirian sejak dini.

Komunitas lokal berperan melengkapi aspek sosial dan budaya yang melekat pada aktivitas edupreneurship. Dalam wawancara, seorang tokoh masyarakat menjelaskan, *“anak-anak harus mengerti bahwa usaha mereka bukan hanya soal untung rugi, tapi juga melestarikan tradisi lokal, misalnya makanan khas Yala atau kerajinan tangan Melayu”* (FGD, 22 Juni 2025). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menghasilkan output ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kultural masyarakat setempat.

Stakeholder eksternal seperti lembaga pemerintah, NGO pendidikan, dan pelaku usaha turut dilibatkan untuk memperluas akses pasar dan sumber daya. Kepala sekolah menyampaikan, *“kami sudah menjalin kerja sama dengan koperasi daerah dan sebuah NGO yang fokus pada kewirausahaan pemuda. Mereka membantu dalam hal pelatihan pemasaran digital dan akses modal kecil”* (Dokumentasi Rapat, 24 Juni 2025). Peran ini menjadi penting karena membuka peluang bagi siswa untuk memahami realitas pasar di luar lingkungan sekolah.

Untuk memperjelas pembagian peran dalam kolaborasi ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Aktor	Peran Utama	Contoh Implementasi
Sekolah (Guru & Siswa)	Fasilitator, mentor, pelaku utama	Mengajar manajemen usaha, produksi barang, praktik jual beli
Komunitas Lokal	Pendukung sosial dan budaya, penguat identitas lokal	Menyediakan bahan baku lokal, melestarikan produk tradisional

Stakeholder Eksternal	Penyedia akses pasar, modal, dan pelatihan teknis	Koperasi daerah, wirausaha, pelatihan digital marketing	NGO
-----------------------	---	---	-----

Kolaborasi tripartit ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif, di mana setiap aktor memainkan peran strategis. Hasilnya, program edupreneurship tidak hanya memberi pengalaman kewirausahaan bagi siswa, tetapi juga membangun jejaring sosial dan ekonomi yang lebih luas.

c. Contoh Konkret Unit Usaha yang Dijalankan

Salah satu contoh nyata unit usaha edupreneurship yang dijalankan di Patnaewitya School adalah produksi makanan ringan khas Melayu, yaitu *kuih karipap*. Produk ini dipilih karena memiliki nilai historis dan budaya yang kuat sekaligus potensi pasar yang luas di wilayah Yala. Seorang guru menyebutkan, “*karipap ini bukan hanya makanan, tapi bagian dari identitas Melayu yang bisa dikenalkan lewat usaha anak-anak*” (Wawancara, 28 Juni 2025).

Proses produksi karipap melibatkan siswa dalam seluruh tahapan. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan adonan, pengisian, hingga pengemasan. Seorang siswa kelas XI bercerita, “*kami belajar cara menghitung kebutuhan tepung, kentang, dan ayam sesuai jumlah produksi. Awalnya sering kelebihan, sekarang lebih pas*” (Diskusi Siswa, 29 Juni 2025). Dari pengalaman ini, siswa terlatih untuk memahami manajemen stok dan pengendalian biaya produksi.

Selain karipap, unit usaha lain yang berkembang adalah kerajinan tangan berupa *anyaman bambu*. Aktivitas ini lahir dari kemitraan dengan pengrajin lokal. Produk yang dihasilkan berupa wadah tradisional yang dimodifikasi menjadi bentuk modern, seperti tempat tisu dan wadah serbaguna. Seorang pengrajin menuturkan, “*kami ajarkan teknik dasar anyaman, lalu siswa menambahkan motif modern supaya bisa masuk ke pasar anak muda*” (Wawancara, 30 Juni 2025). Dengan demikian, kolaborasi ini menghasilkan produk yang bernilai budaya sekaligus relevan secara ekonomi.

Untuk memperjelas unit usaha yang dijalankan, berikut tabel ringkasnya:

Jenis Usaha	Produk	Keterlibatan Siswa	Kolaborasi Eksternal
Makanan Tradisional	<i>Kuih Karipap</i>	Produksi penuh: pengadaan bahan, memasak, mengemas	Guru pembina & dukungan orang tua
Kerajinan Lokal	Anyaman bambu	Mendesain motif, proses produksi, pengemasan	Pengrajin lokal sebagai mentor
Produk Inovatif	Pulut Panggang	Eksperimen varian rasa, promosi saat bazar sekolah	Dukungan komunitas & koperasi desa

Contoh konkret unit usaha ini memperlihatkan bagaimana siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi pengalaman kewirausahaan melalui aktivitas nyata. Kegiatan ini juga menguatkan fungsi sekolah sebagai laboratorium sosial-ekonomi yang terhubung dengan komunitas lokal.

4. Dinamika Partisipasi dalam Pendampingan

a. Peran Guru, Siswa, dan Masyarakat

Pendampingan dalam program edupreneurship di Patnaewitya School memperlihatkan keterlibatan aktor-aktor utama yang berperan secara berbeda namun saling melengkapi. Guru berperan sebagai mentor, siswa menjadi pelaku utama, sedangkan masyarakat hadir sebagai pendukung. Ketiga peran ini menciptakan sebuah ekosistem kolaboratif yang menumbuhkan suasana belajar kontekstual dan berorientasi pada praktik nyata.

Guru memainkan peran sebagai mentor yang mengarahkan jalannya kegiatan. Mereka

membimbing siswa dalam memahami konsep manajemen usaha, sekaligus memberikan contoh langsung dalam mengatasi permasalahan lapangan. Seorang guru ekonomi menuturkan, *“kami tidak hanya menyampaikan teori bisnis, tetapi juga ikut turun tangan saat anak-anak bingung menentukan harga jual atau cara menghitung keuntungan”* (Wawancara, 5 Juli 2025). Kehadiran guru sebagai mentor memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan tidak keluar dari kerangka pendidikan, melainkan tetap menjadi sarana pembelajaran yang terstruktur.

Siswa menempati posisi sebagai pelaku utama yang menjalankan seluruh aktivitas usaha, mulai dari perencanaan, produksi, pengemasan, hingga pemasaran. Partisipasi siswa bukan sebatas tugas tambahan, melainkan pengalaman nyata yang membangun kepercayaan diri dan keterampilan praktis. Salah seorang siswa menyampaikan, *“kami merasa seperti benar-benar punya usaha, semua proses kami lakukan sendiri, guru hanya memberi arahan dan masukan”* (Diskusi Siswa, 6 Juli 2025). Peran ini memberi ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, sekaligus mempraktikkan nilai kemandirian yang diharapkan sekolah.

Masyarakat berperan sebagai pendukung yang memberikan legitimasi sosial sekaligus sumber daya penting. Dukungan ini tampak melalui keterlibatan orang tua yang membantu menyediakan bahan baku, tokoh masyarakat yang memfasilitasi akses pasar, hingga komunitas lokal yang membeli produk siswa. Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan, *“kami membeli produk anak-anak bukan hanya karena kebutuhan, tapi juga sebagai bentuk dukungan agar mereka bersemangat belajar”* (FGD, 7 Juli 2025). Peran masyarakat ini memperkuat posisi sekolah sebagai pusat pembelajaran yang terhubung dengan lingkungan sosial-ekonomi sekitarnya.

Untuk memperjelas pembagian peran dalam dinamika pendampingan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Aktor	Peran Utama	Bentuk Partisipasi Konkret
Guru	Mentor	Membimbing konsep bisnis, mendampingi proses produksi dan evaluasi usaha
Siswa	Pelaku	Menjalankan perencanaan, produksi, pengemasan, dan pemasaran produk
Masyarakat	Pendukung	Menyediakan bahan baku, membeli produk siswa, membuka akses ke pasar lokal

Sinergi dari ketiga peran ini menciptakan dinamika pendampingan yang berlapis: guru memastikan arah, siswa menjadi motor penggerak, dan masyarakat memperkuat keberlanjutan. Dengan model ini, edupreneurship di Patnaewitya School bukan sekadar proyek sekolah, melainkan sebuah proses kolaboratif yang membangun jejaring pembelajaran antara institusi pendidikan dan komunitas lokal.

b. Faktor Pendukung Partisipasi

Keberhasilan program edupreneurship di Patnaewitya School tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendukung yang menjadi fondasi kuat dalam menggerakkan partisipasi seluruh elemen sekolah dan masyarakat. Ada tiga faktor utama yang dominan, yaitu semangat kolektif, nilai keislaman, dan solidaritas komunitas.

Pertama, semangat kolektif yang tumbuh di antara guru, siswa, dan masyarakat menjadi motor penggerak utama. Program ini bukan hanya sekadar inisiatif individu, tetapi lahir dari kesadaran bersama untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kemandirian. Salah seorang guru menyampaikan, *“kalau hanya guru yang bergerak, pasti program ini cepat berhenti. Tapi karena semua ikut merasa memiliki, program ini terus berjalan”* (Wawancara Guru, 14 Juli 2025). Semangat kolektif ini membuat setiap pihak merasa terlibat langsung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Kedua, nilai keislaman menjadi sumber motivasi moral sekaligus etika dalam mengelola kegiatan. Ajaran tentang kerja keras (*al-jidd wa al-ijthād*), keikhlasan (*al-ikhhlās*), dan tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah ijtīmā’iyyah*) menjadi landasan utama. Kepala sekolah menegaskan, *“anak-anak belajar wirausaha bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga sebagai ibadah dan bentuk syukur atas rezeki Allah”* (Wawancara, 15 Juli 2025). Nilai keislaman ini pula yang

membuat kegiatan lebih terarah dan menjauhkan siswa dari praktik usaha yang merugikan orang lain.

Ketiga, solidaritas komunitas menjadi penopang dalam bentuk dukungan material maupun non-material. Orang tua dan masyarakat sekitar turut memberikan kontribusi, mulai dari menyumbangkan bahan baku hingga membantu memasarkan produk siswa. Seorang wali murid menyebutkan, *“saya sering membantu anak-anak menjual produk mereka ke tetangga. Bukan karena untung, tapi karena ingin mendukung semangat mereka”* (Wawancara, 16 Juli 2025). Solidaritas ini memperlihatkan bahwa program tidak hanya milik sekolah, tetapi menjadi gerakan komunitas yang lebih luas.

Untuk memperjelas, berikut ringkasan faktor pendukung partisipasi:

Faktor	Bentuk Konkret	Dampak terhadap Program
Semangat Kolektif	Guru, siswa, orang tua merasa memiliki program	Keberlanjutan program terjaga, partisipasi tinggi
Nilai Keislaman	Motivasi ibadah, etika usaha, tanggung jawab sosial	Usaha siswa berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan
Solidaritas Komunitas	Dukungan orang tua, partisipasi masyarakat dalam distribusi dan promosi produk	Program meluas ke masyarakat, membangun relasi sosial yang kuat

Dengan adanya ketiga faktor ini, partisipasi dalam program edupreneurship menjadi lebih solid. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat berjalan efektif ketika didukung oleh kekuatan kolektif, nilai religius yang mengakar, dan jaringan solidaritas yang kokoh.

c. Hambatan Partisipasi

Meski partisipasi dalam program edupreneurship di Patnaewitya School cenderung tinggi, tetap ada sejumlah hambatan yang muncul dalam praktiknya. Hambatan ini penting untuk dicermati agar program pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Tiga faktor utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal, resistensi, dan manajemen waktu.

Pertama, keterbatasan modal menjadi kendala yang paling banyak dirasakan oleh siswa dan sekolah. Modal awal yang minim membuat jenis usaha yang dijalankan relatif kecil dan belum mampu menjangkau pasar lebih luas. Seorang siswa menuturkan, *“kami sering kesulitan menambah modal, kadang harus pakai uang saku sendiri untuk melanjutkan produksi”* (Wawancara Siswa, 18 Juli 2025). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya inovasi produk serta lambatnya perputaran usaha.

Kedua, resistensi muncul dari sebagian kecil siswa maupun orang tua yang menganggap program edupreneurship membebani. Ada siswa yang merasa aktivitas usaha mengurangi waktu belajar akademik, sementara beberapa orang tua beranggapan wirausaha tidak seharusnya menjadi prioritas di sekolah. Salah seorang wali murid mengungkapkan, *“anak saya sudah banyak tugas, ditambah lagi harus jualan, kadang jadi kewalahan”* (Wawancara, 19 Juli 2025). Resistensi ini meskipun tidak dominan, tetap menjadi tantangan yang harus diatasi dengan pendekatan komunikatif.

Ketiga, manajemen waktu menjadi hambatan yang sering dialami siswa. Aktivitas sekolah yang padat, mulai dari kegiatan akademik, ekstrakurikuler, hingga kewajiban keagamaan, membuat siswa harus pandai membagi waktu. Seorang guru pendamping menyatakan, *“anak-anak sering tidak sempat menyelesaikan laporan usaha karena waktunya habis untuk kegiatan sekolah lain”* (Wawancara Guru, 20 Juli 2025). Hal ini menunjukkan perlunya strategi penjadwalan yang lebih fleksibel agar kegiatan wirausaha tidak mengganggu kewajiban utama siswa.

Untuk memperjelas, hambatan-hambatan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Hambatan	Bentuk Konkret	Dampak terhadap Program
Keterbatasan Modal	Modal awal minim, siswa menggunakan uang pribadi	Jenis usaha terbatas, inovasi rendah, perputaran lambat

Resistensi	Siswa merasa terbebani, orang tua ragu manfaat program	Menurunnya partisipasi sebagian kecil pihak, butuh pendekatan khusus
Manajemen Waktu	Jadwal padat, kewajiban akademik dan keagamaan mengurangi waktu usaha	Laporan dan kegiatan usaha sering tertunda, efektivitas berkurang

Dengan memahami hambatan-hambatan ini, sekolah dapat merancang strategi mitigasi, seperti penyediaan dana bergulir, komunikasi intensif dengan orang tua, serta integrasi kegiatan wirausaha ke dalam kurikulum sekolah agar manajemen waktu lebih efisien.

5. Analisis Hasil Implementasi

a. Perubahan Positif

Pelaksanaan program edupreneurship di Patnaewitya School Yala-Thailand menunjukkan sejumlah perubahan positif yang signifikan, baik pada tingkat sekolah, siswa, maupun relasi sosial dengan masyarakat. Perubahan ini menegaskan bahwa pendampingan berbasis manajemen kolaboratif mampu menghasilkan dampak nyata yang sesuai dengan tujuan pendidikan kewirausahaan.

Pertama, meningkatnya kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya menjadi capaian yang paling nyata. Program edupreneurship tidak hanya menghasilkan produk yang bernilai jual, tetapi juga membantu sekolah memperoleh tambahan pendapatan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Kepala sekolah menyebutkan, *“dulu kami hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan donatur. Sekarang sebagian kegiatan bisa dibiayai dari hasil usaha anak-anak”* (Wawancara, 21 Juli 2025). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari ketergantungan menuju kemandirian.

Kedua, tumbuhnya keterampilan siswa dalam aspek produksi, manajemen, dan pemasaran produk. Melalui keterlibatan langsung, siswa memperoleh pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari pembelajaran konvensional. Seorang siswa kelas XI menuturkan, *“kami jadi lebih percaya diri karena bisa mengatur modal, menjual produk, dan belajar bagaimana berhadapan dengan pelanggan”* (Diskusi Siswa, 22 Juli 2025). Keterampilan ini berfungsi sebagai bekal penting bagi siswa untuk menghadapi dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha setelah lulus.

Ketiga, meningkatnya jejaring sosial antara sekolah dan masyarakat. Melalui kegiatan bazar, promosi, dan distribusi produk, terjalin interaksi yang lebih erat antara siswa, guru, dan komunitas lokal. Seorang tokoh masyarakat menegaskan, *“program ini membuat kami lebih dekat dengan sekolah, bukan hanya sebagai orang tua murid tapi juga sebagai mitra usaha”* (FGD, 23 Juli 2025). Jejaring sosial ini memperluas dukungan bagi keberlanjutan program sekaligus memperkuat posisi sekolah di tengah masyarakat.

Untuk memperjelas capaian perubahan positif, berikut ringkasannya:

Aspek Perubahan	Bentuk Konkret	Dampak Positif
Kemandirian Sekolah	Pendapatan tambahan dari usaha siswa	Mengurangi ketergantungan pada donatur, mendukung kegiatan
Keterampilan Siswa	Pengalaman produksi, manajemen, pemasaran	Meningkatkan kepercayaan diri, bekal kerja dan usaha mandiri
Jejaring Sosial	Kerjasama dengan masyarakat dalam distribusi dan promosi produk	Hubungan sekolah-masyarakat semakin erat, dukungan luas

Ketiga perubahan positif tersebut menunjukkan bahwa program edupreneurship tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas institusional, pengembangan karakter siswa, dan pembangunan relasi sosial yang sehat.

b. Tantangan yang masih tersisa

Walaupun program edupreneurship di Patnaewitya School telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar keberlanjutan program dapat

terjaga. Tantangan ini mencakup aspek kesinambungan usaha, diversifikasi produk, dan penguatan kapasitas manajerial.

Pertama, kesinambungan usaha masih menjadi persoalan utama. Sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan siswa bergantung pada dukungan guru dan struktur sekolah. Ketika terjadi pergantian siswa atau guru pendamping, sering kali kontinuitas usaha terganggu. Salah seorang guru pendamping menyampaikan, *“tantangan kami adalah bagaimana program ini tetap berjalan meskipun siswa yang sekarang sudah lulus”* (Wawancara, 24 Juli 2025). Hal ini menunjukkan perlunya sistem kelembagaan yang lebih kuat agar program tidak bergantung pada individu tertentu.

Kedua, diversifikasi produk masih terbatas pada jenis-jenis usaha sederhana seperti makanan ringan, minuman herbal, dan kerajinan tangan. Kondisi ini membuat program rentan mengalami kejenuhan pasar. Seorang siswa mengakui, *“kadang kami merasa produk yang dijual terlalu itu-itu saja, sehingga sulit menarik pembeli baru”* (Diskusi Siswa, 25 Juli 2025). Minimnya inovasi produk menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan dan dukungan teknologi agar siswa dapat menghasilkan variasi usaha yang lebih kompetitif.

Ketiga, kapasitas manajerial masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat. Beberapa siswa dan guru mengaku kesulitan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Kepala sekolah menegaskan, *“kami sudah bisa memulai usaha, tetapi kelemahan kami ada pada manajemen, terutama membuat laporan yang rapi dan strategi pengembangan”* (Wawancara, 26 Juli 2025). Tanpa penguatan kapasitas manajerial, keberhasilan usaha hanya akan bersifat jangka pendek.

Untuk memperjelas, tantangan yang masih tersisa dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tantangan	Bentuk Konkret	Dampak Negatif
Kesinambungan Usaha	Usaha bergantung pada siswa/guru tertentu	Terjadi stagnasi atau berhenti saat ada pergantian individu
Diversifikasi Produk	Produk masih terbatas pada makanan ringan dan kerajinan sederhana	Pasar jenuh, sulit bersaing dengan produk komersial lain
Kapasitas Manajerial	Pencatatan keuangan dan perencanaan jangka panjang lemah	Usaha kurang efisien, tidak ada strategi pengembangan jelas

Dengan demikian, meskipun program edupreneurship telah membawa dampak positif, tantangan-tantangan ini harus segera ditangani agar transformasi manajemen sekolah menuju kemandirian dapat berlanjut dan berkembang lebih jauh.

6. Diskusi Teoritis: Kolaborasi & Edupreneurship

a. Keterhubungan temuan lapangan dengan teori manajemen kolaborasi

Temuan lapangan di Patnaewitya School Yala-Thailand memperlihatkan bahwa keberhasilan program edupreneurship tidak terlepas dari praktik kolaborasi yang terstruktur antara guru, siswa, dan masyarakat. Dinamika ini selaras dengan teori manajemen kolaborasi yang dikemukakan oleh Gray (1989), yang menekankan bahwa kolaborasi adalah proses pengelolaan interaksi antar-aktor untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual.

Dalam konteks sekolah, guru berperan sebagai mentor strategis yang memastikan visi dan arah program tetap sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini konsisten dengan pandangan Gray bahwa dalam kolaborasi diperlukan fasilitator yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tanpa mendominasi. Seorang guru menuturkan, *“kami tidak bisa memaksakan model usaha tertentu, yang penting anak-anak belajar mengambil keputusan sendiri dengan arahan”* (Wawancara, 21 Juli 2025). Kutipan ini menunjukkan peran fasilitatif guru dalam menjaga keseimbangan kolaborasi.

Siswa sebagai pelaku utama menggambarkan dimensi kolaborasi dalam bentuk partisipasi aktif. Gray (1989) menegaskan bahwa kolaborasi terjadi ketika semua pihak memiliki kontribusi

nyata, bukan sekadar simbolis. Keterlibatan siswa dalam produksi, pemasaran, hingga pengambilan keputusan membuktikan bahwa mereka bukan hanya objek pembelajaran, melainkan subjek aktif dalam manajemen kewirausahaan.

Masyarakat, di sisi lain, bertindak sebagai aktor pendukung eksternal yang memperkuat legitimasi program. Partisipasi mereka melalui dukungan bahan baku, pembelian produk, hingga penyediaan jaringan distribusi mencerminkan apa yang disebut Gray sebagai *resource sharing*, yakni kontribusi nyata dari mitra eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Seorang tokoh masyarakat mengatakan, *“kami ikut beli produk anak-anak bukan hanya untuk konsumsi, tapi sebagai tanda kami ingin program ini terus berjalan”* (FGD, 23 Juli 2025).

Bila ditarik pada kerangka Gray, dinamika kolaborasi di Patnaewitya School menunjukkan adanya tiga elemen kunci: (1) adanya tujuan bersama untuk menciptakan kemandirian sekolah, (2) distribusi peran yang jelas antara guru, siswa, dan masyarakat, serta (3) mekanisme berbagi sumber daya. Ketiga elemen ini membuktikan bahwa kolaborasi bukan sekadar jargon, melainkan terimplementasi nyata dalam praktik edupreneurship di sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan lapangan memperkuat relevansi teori Gray (1989) dalam konteks pendidikan Islam minoritas di Yala. Kolaborasi bukan hanya instrumen manajemen, melainkan juga menjadi nilai sosial yang menopang keberlanjutan program.

b. Aplikasinya dalam Konteks Edupreneurship Sekolah

Aplikasi teori manajemen kolaborasi dalam praktik edupreneurship di Patnaewitya School terlihat jelas dalam bagaimana aktor-aktor pendidikan mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang. Dengan sumber daya terbatas, baik dari segi modal, fasilitas, maupun tenaga, sekolah berhasil menjadikan kolaborasi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Keterbatasan modal yang semula menjadi hambatan dialihkan menjadi peluang untuk melatih kreativitas siswa. Alih-alih mengandalkan modal besar, guru mengajarkan siswa untuk memanfaatkan bahan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Seorang siswa mengungkapkan, *“kami belajar membuat minuman herbal dari tanaman yang ada di sekitar sekolah, jadi tidak perlu modal banyak”* (Wawancara, 24 Juli 2025). Pendekatan ini mencerminkan strategi *resource optimization*, sebagaimana ditegaskan Gray (1989), bahwa kolaborasi menekankan pada pemanfaatan maksimal sumber daya yang ada.

Selain itu, keterbatasan waktu akibat jadwal akademik yang padat tidak selalu menjadi hambatan. Program edupreneurship diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran sehingga usaha siswa menjadi bagian dari kurikulum praktik. Kepala sekolah menjelaskan, *“anak-anak tidak kami bebaskan di luar jam sekolah, tapi kami masukkan dalam kegiatan belajar sehingga lebih efektif”* (Wawancara, 25 Juli 2025). Integrasi ini mengubah tantangan manajemen waktu menjadi inovasi kurikulum yang lebih aplikatif.

Keterbatasan jaringan distribusi juga berhasil diatasi melalui dukungan masyarakat. Ketika akses ke pasar formal terbatas, orang tua dan komunitas lokal menjadi saluran pemasaran utama. Hal ini membuktikan adanya prinsip *network leveraging*, yaitu memanfaatkan jejaring sosial yang sudah ada sebagai sarana distribusi produk. Seorang wali murid menyampaikan, *“produk anak-anak saya titipkan di warung kecil sekitar sini, dan alhamdulillah laris”* (Wawancara, 26 Juli 2025).

Dengan demikian, keterbatasan yang dihadapi sekolah tidak dipandang sebagai penghalang, tetapi dijadikan titik tolak untuk menciptakan inovasi. Kolaborasi guru, siswa, dan masyarakat memungkinkan setiap hambatan dialihkan menjadi peluang untuk memperkuat kompetensi kewirausahaan siswa sekaligus membangun kemandirian sekolah.

c. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan dari program edupreneurship di Patnaewitya School Yala-Thailand memiliki kesesuaian sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai kewirausahaan pendidikan di komunitas minoritas. Perbandingan ini penting untuk memperlihatkan posisi penelitian saat ini

dalam peta literatur akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020) di pesantren perbatasan Indonesia-Malaysia, misalnya, menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya di daerah minoritas dapat mendorong lahirnya inovasi berbasis lokal. Para santri di pesantren tersebut memanfaatkan bahan baku setempat untuk menghasilkan produk pangan yang dipasarkan secara sederhana di komunitas lokal. Kondisi ini selaras dengan temuan di Patnaewitya School, di mana keterbatasan modal justru melahirkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan bahan lokal seperti tanaman herbal untuk produk minuman.

Sementara itu, studi oleh Abdullah dan Ismail (2021) di sekolah Islam minoritas di Filipina menekankan pentingnya dukungan komunitas sebagai penopang utama kewirausahaan pendidikan. Dukungan ini berupa penyediaan akses pasar dan legitimasi sosial, sehingga program wirausaha tidak hanya berorientasi pada siswa tetapi juga menjadi gerakan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan konteks Patnaewitya School, di mana solidaritas komunitas lokal terbukti menjadi faktor penting bagi keberlangsungan program.

Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian Nasir (2019) di komunitas Muslim minoritas Eropa. Dalam studinya, tantangan utama bukan pada keterbatasan modal, melainkan pada resistensi kultural terhadap kewirausahaan berbasis agama. Beberapa siswa merasa usaha yang dikaitkan dengan nilai keislaman tidak relevan dengan kebutuhan modern. Sebaliknya, di Patnaewitya School, nilai keislaman justru menjadi landasan moral yang memperkuat partisipasi siswa dan masyarakat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa program edupreneurship di Patnaewitya School memperkaya literatur dengan menegaskan dua poin utama. Pertama, keterbatasan sumber daya dalam komunitas minoritas dapat diubah menjadi peluang inovatif melalui kolaborasi yang solid. Kedua, nilai keislaman dalam konteks Thailand Selatan bukan hambatan, melainkan kekuatan yang meneguhkan identitas sekaligus meningkatkan partisipasi. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan teori edupreneurship di komunitas minoritas dengan menekankan peran nilai religius sebagai faktor penguat, bukan penghambat.

7. Implikasi Pengabdian Pada Masyarakat

a. Implikasi teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori edupreneurship, khususnya dalam konteks komunitas minoritas muslim di Asia Tenggara. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak—guru, siswa, dan masyarakat—bukan hanya faktor pendukung, melainkan fondasi utama bagi keberhasilan program edupreneurship di sekolah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kewirausahaan pendidikan tidak dapat dipahami secara individual, melainkan harus dilihat sebagai proses kolektif yang melibatkan interaksi sosial, nilai budaya, dan solidaritas komunitas.

Kontribusi teoretis lain adalah munculnya model edupreneurship berbasis nilai keislaman, di mana prinsip-prinsip etika, keberkahan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari praktik kewirausahaan. Temuan ini memperluas literatur yang sebelumnya lebih banyak menekankan aspek teknis manajemen usaha, dengan menambahkan dimensi moral-religius sebagai variabel penting.

Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi sekaligus mengembangkan teori *social capital* dalam pendidikan. Di Patnaewitya School, jaringan sosial berbasis nilai dan solidaritas terbukti mampu menutupi keterbatasan modal finansial. Dengan demikian, konsep edupreneurship yang lahir dari penelitian ini dapat diposisikan sebagai model alternatif kewirausahaan pendidikan berbasis kolaborasi dan nilai, yang relevan tidak hanya di Thailand Selatan tetapi juga di komunitas minoritas lain yang menghadapi kondisi serupa.

b. Implikasi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini membuka ruang bagi sekolah-sekolah minoritas lain untuk mereplikasi model edupreneurship berbasis kolaborasi. Patnaewitya School menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya bukanlah penghalang mutlak, selama terdapat pola kemitraan yang jelas

antara guru, siswa, dan masyarakat. Pola ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan yang menghadapi kondisi serupa, baik di Thailand Selatan, Indonesia, maupun wilayah Asia Tenggara lain dengan karakteristik minoritas muslim.

Model praktik yang lahir dari penelitian ini menekankan pada tiga aspek utama, yaitu pendampingan intensif oleh guru sebagai mentor, pemberdayaan siswa sebagai pelaku utama kegiatan usaha, serta dukungan masyarakat dalam bentuk tenaga, jaringan, maupun modal sosial. Dengan demikian, edupreneurship tidak lagi dipahami sebagai proyek sekolah semata, melainkan sebagai gerakan sosial yang memberi manfaat langsung bagi komunitas sekitar.

Selain itu, temuan ini memberi arahan bagi pengambil kebijakan lokal maupun organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan pendidikan. Replikasi model Patnaewitya School dapat dilakukan dengan adaptasi pada konteks sosial-budaya masing-masing daerah, sehingga fleksibel untuk diterapkan baik di daerah pedesaan, urban, maupun komunitas minoritas yang terpinggirkan secara ekonomi.

c. Rekomendasi bagi stakeholder pendidikan di Thailand Selatan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang perlu ditindaklanjuti oleh studi berikutnya. Fokus pada satu sekolah, yaitu Patnaewitya School Yala, membuat hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi sepenuhnya untuk semua sekolah minoritas di Thailand maupun kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan beberapa sekolah dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Selain itu, penelitian ke depan dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program edupreneurship terhadap perkembangan keterampilan kewirausahaan siswa. Penggunaan instrumen survei misalnya, dapat melengkapi data wawancara mendalam sehingga validitas temuan semakin kuat.

Tidak kalah penting, studi lanjutan juga dapat mengkaji aspek gender dalam partisipasi edupreneurship di sekolah minoritas. Hal ini relevan karena keterlibatan siswa perempuan dan laki-laki dalam kegiatan kewirausahaan seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya setempat. Penelitian yang memperhatikan perbedaan tersebut akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif.

Dengan demikian, rekomendasi penelitian lanjutan menekankan perlunya perluasan konteks, penguatan metodologi, dan pendalaman isu-isu spesifik agar konsep edupreneurship berbasis kolaborasi semakin matang baik secara teoritis maupun praktis.

Kesimpulan

Penelitian pengabdian masyarakat di Patnaewitya School Yala-Thailand menegaskan bahwa pengembangan manajemen edupreneurship berbasis kolaborasi merupakan strategi yang efektif untuk menjawab tantangan keterbatasan dana, posisi sebagai sekolah minoritas Muslim, serta kebutuhan akan kemandirian finansial. Melalui pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, pendampingan berhasil menghadirkan keterlibatan aktif guru sebagai mentor, siswa sebagai pelaku utama, dan masyarakat sebagai pendukung, sehingga tercipta ekosistem kolaboratif yang memperkuat keberlanjutan program.

Hasil implementasi menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan. Pertama, sekolah mampu meningkatkan kemandirian finansial melalui unit usaha sederhana yang dikelola lebih baik. Kedua, siswa memperoleh keterampilan praktis dalam produksi, manajemen, dan pemasaran, yang berfungsi sebagai bekal kewirausahaan di masa depan. Ketiga, jejaring sosial antara sekolah dan masyarakat semakin erat, sehingga memperluas dukungan moral maupun material terhadap keberlangsungan program.

Temuan juga mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya bukanlah penghalang mutlak, melainkan dapat diubah menjadi peluang melalui pemanfaatan bahan lokal, integrasi kurikulum, dan dukungan jejaring sosial. Faktor pendukung seperti semangat kolektif, nilai keislaman, dan solidaritas komunitas memperkuat partisipasi, sementara hambatan berupa keterbatasan modal, resistensi, dan manajemen waktu memberikan pelajaran penting untuk strategi penguatan ke depan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur edupreneurship dengan menegaskan relevansi teori manajemen kolaborasi dalam konteks sekolah minoritas Muslim. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat direplikasi di sekolah lain dengan kondisi serupa di Asia Tenggara, sehingga memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan komunitas.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa edupreneurship berbasis kolaborasi bukan sekadar solusi sementara atas keterbatasan ekonomi, tetapi juga instrumen transformatif yang mampu mengintegrasikan fungsi pendidikan, penguatan identitas budaya, serta pembangunan sosial-ekonomi di lingkungan minoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Ismail, N. (2021). *Community-based entrepreneurship in minority Muslim schools: A model of participatory education in the Philippines*. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(2), 115–132.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burns, D. (2015). *Action research for transformation: A handbook for community practitioners*. Bristol: Policy Press.
- Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning. *International Journal of Management Reviews*, 4(3), 233–269.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Harish, S. P. (2020). *Ethnic minorities and the state in Thailand: Negotiating identity and belonging in the South*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hidayat, A. (2021). *Manajemen kewirausahaan pesantren menuju kemandirian ekonomi pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kuratko, D. F. (2016). *Entrepreneurship: Theory, process, and practice* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory action research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasir, A. (2019). Islamic entrepreneurship among Muslim minorities in Europe: Between faith and modernity. *Journal of Contemporary Islam*, 13(2), 187–204.
- Rahman, F. (2020). Local innovation in Islamic boarding schools: Edupreneurship practices on the Indonesia–Malaysia border. *Indonesian Journal of Islamic Education*, 8(1), 45–62.
- Rahman, M. (2022). *Entrepreneurship education in Southern Thailand: Issues and challenges*. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
- Suryana, Y. (2013). *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tilaar, H. A. R. (2011). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian kebijakan, teori, dan praktik*.

Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zamroni, M. (2020). Kolaborasi pendidikan dan masyarakat dalam penguatan kemandirian sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 22–37.

Yusoff, R. M., & Wahab, S. A. (2020). The role of social capital in developing Islamic entrepreneurship. *Journal of Islamic Management Studies*, 7(2), 101–118.